

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sejarah kelam yang menyebabkan trauma berkepanjangan yang dirasakan oleh seluruh warga negara. Peristiwa G30 S/PKI merupakan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah kelam itu dimana peristiwa tersebut mengikis rasa kemanusiaan sampai habis tak bersisa. Rakyat sipil maupun kalangan militer menjadi korbannya. PKI berhaluan komunis yang merupakan sebuah ideologi dengan perkembangannya yang pesat disamping ideologi-ideologi lain yang ada di dunia.¹ Ideologi ini juga menolak adanya pemupukan kekayaan atau keuntungan untuk si pemilik modal yang kemudian selalu diganggu oleh PKI.² Pada dasarnya PKI memang sudah menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap bangsa Indonesia. Partai ini tetap kukuh pada pendiriannya ingin mengganti dasar negara republik Indonesia yaitu Pancasila dengan ideologi komunis. Segala bentuk perlawanan partai ini yang ditentang oleh bangsa Indonesia kemudian membuat PKI merencanakan sesuatu yang besar.

Sebelum peristiwa G30S/PKI terjadi, beredar kabar bahwa kesehatan Presiden Soekarno sedang tidak baik bahkan didiagnosa kemungkinan Presiden akan mengalami kelumpuhan dan terburuknya adalah meninggal dunia. Aidit yang mendengar berita tersebut memanfaatkan kesempatan untuk memulai pergerakan.³ Rencana pergerakan tersebut diserahkan kepada Kamaruzaman yang menjabat sebagai ketua biro khusus. Kamaruzaman kemudian menghubungi kadernya, seperti Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa, Kolonel

¹ Suryajaya, Martin, *Teks-teks Kunci Filsafat Marx*. Yogyakarta: Resist Book, 2016, hlm. 95.

² Louis. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, hlm. 423.

³ Atmoko, *Gelas-Gelas Retak Trilogi Catatan Aktivistis PNI & Tragedi 1965*. Bandung: Ultimus, 2014, hlm. 59.

Sunardi, Brigjen Soepardjo dan sederet tokoh lainnya.

Menjelang peristiwa G30S/PKI para pimpinan partai itu melakukan beberapa kali pertemuan rahasia tempatnya terus berpindah pindah untuk menghilangkan jejak. Pada pertemuan tersebut, petinggi PKI memutuskan gerakan 30 September secara fisik ditempuh dengan kekuatan militer yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, dan Komandan Bataliyon 1 Resimen Cakrabirawa sebagai pimpinan formal seluruh gerakan. Letnan Kolonel Untung memerintahkan seluruh anggota gerakan untuk memulai aksinya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.⁴

PKI melancarkan rencana keji yaitu menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat tersebut disiksa dan dibunuh setelah itu mereka dibawa dibawa ke Lubang Buaya yang bertempat di sebelah selatan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Perwira Angkatan Darat tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua selanjutnya ditimbun dengan sampah dan tanah. Adapun perwira Angkatan Darat yang menjadi korbannya adalah sebagai berikut:⁵

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Komandan Panglima Angkatan Darat)
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputy II Panglima Angkatan Darat)
3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Panglima Angkatan Darat)
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Panglima Angkatan Darat)
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Panglima Angkatan Darat)
6. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution)

Pada tanggal 1 Oktober 1965 dilaksanakan operasi penumpasan G30S/PKI pada pukul 19.15 WIB dan diusahakan tidak menimbulkan bentrokan senjata yang akan memakan

⁴ *Ibid*, hlm. 62.

⁵ *Ibid*, hlm. 62.

korban lebih banyak lagi. Menetralisasi pasukan yang berada di tempat yang dijadikan markas oleh penggagas Gerakan 30 September yaitu di sekitar Medan Merdeka adalah hal pertama yang dilakukan. Pasukan terdiri dari anggota Batalyon 503/Brawijaya dan Batalyon 545/Diponegoro. Pasukan Batalyon 503/Brawijaya berhasil ditarik mundur ke Markas Kostrad sedangkan untuk pasukan Batalyon 545/Diponegoro ditarik mundur ke Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, gedung RRI pusat berhasil direbut kembali oleh pasukan RPKAD begitupun dengan tempat lain yang berhasil direbut kembali oleh ABRI dengan tanpa adanya bentrokan senjata.⁶ Berbagai upaya lain pun dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembersihan sisa-sisa PKI dan Soeharto lah yang menjadi peran utama sehingga mampu menaikkan pamornya dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Pada dasarnya faham komunis dalam perkembangannya membawa bencana kemanusiaan di Indonesia, banyak sekali orang dari berbagai kalangan menjadi korban dari faham ini, yang sukses menorehkan luka dan kepiluan yang amat dalam bagi perjalanan bangsa Indonesia dan yang paling miris sejarah kelam itu terus dibawa ke ranah politik ketatanegaraan Indonesia. Diperlukan pengorbanan dalam mengiringi peralihan rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Setelah penumpasan dan pembersihan atas rencana kudeta yang dilancarkan oleh PKI atau yang lazim disebut dengan nama G30S/PKI, rezim Orde Baru menguasai seluruh aspek kehidupan bangsa ini.

MPRS mengeluarkan TAP XXXIII/MPRS/1967 pada tanggal 22 februari 1967 yang isinya tentang pencabutan kekuasaan Soekarno, tidak diperbolehkan mengikuti pemilu selanjutnya dan penetapan Soeharto jadi presiden. Dikeluarkan pula TAP XLI/MPRS/68 yang pada intinya mengenai mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan

⁶ *Ibid*, hlm. 65.

menghapus jejak-jejak G30S/PKI.⁷ Berakhirnya peristiwa G30S/PKI 1965 memang menjadi titik awal pembersihan sisa-sisa PKI karena masyarakat yang dianggap simpatisan PKI akan ditangkap dan ditahan di penjara khusus bagi tahanan politik dan sebagian besar tapol yang termasuk golongan B akan ditempatkan di Pulau Buru. Mereka akan diawasi secara ketat oleh tentara dan mereka diharuskan bekerja merubah Pulau Buru dari yang tadinya masih berbentuk hutan menjadi tempat yang lebih berguna seperti lahan pertanian dan tempat tinggal untuk membentuk lingkungan sosial berikut dengan segala fasilitasnya.⁸

Tindakan-tindakan yang dilakukan PKI dianggap sebagai penghianatan terhadap bangsa dan negara.⁹ Oleh karena itu pada masa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto terdapat diskriminasi terhadap mantan tahanan politik PKI beserta keluarganya, seperti adanya larangan menjadi birokrasi pemerintah baik itu sebagai Pegawai Negeri Sipil, ABRI maupun yang lainnya. Hal tersebut terus berlangsung selama Orde Baru. Semua itu berubah pada masa reformasi dimana pada saat itu ada amandemen UUD 1945 yang isinya penghapusan diskriminasi terhadap mantan tahanan politik PKI begitu juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa diskriminasi terhadap mantan tapol PKI bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas, bahwa para tapol bukan hanya diisolasi, tetapi juga diwajibkan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sudah diatur. Diantaranya meliputi, mencetak sawah, menanam, memanen, memabat hutan, membuat jalan, rumah, bendungan hingga tempat ibadah serta berbagai pekerjaan berat lainnya. Para tapol juga dituntut hidup mandiri, membiayai lauk pauk petugas sampai keharusan membiayai

⁷ Artikel Peringatan Peristiwa Gerakan 30 September, dengan alamat: <https://sma13smg.sch.id/materi/30-september-1965-peringatan-peristiwa-gerakan-30-september-g30s-pki/>. Diakses tanggal 27 September 2022.

⁸ Tati Haryati, Tahanan Politik Pulau Buru Maluku (1969-1979), *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 3(2), hlm. 685.

⁹ Moedjiyanto, *Indonesia Abad ke 20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita ke III*. Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 133-134.

pembangunan sarana prasarana. Selain itu, hasil dari proyek yang dikerjakan para tapol, seperti hasil penggergajian kayu akan digunakan sebagai pengisi kas. Singkatnya, terjadi eksploitasi terhadap tenaga tapol. Tahanan politik Pulau Buru harus dihadapkan pada suatu keadaan yang rumit dan menyiksa dimana kebebasan terbatas, dipaksa bekerja, menerima beberapa bentuk kekerasan fisik dan yang paling berat adalah jauh dari sanak keluarga. Semua hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental para tapol, akibatnya kebanyakan tapol memiliki sifat yang cenderung tertutup dan pendiam. Selain itu, tahanan politik Pulau Buru yang semuanya adalah laki-laki, juga turut memberikan dampak terhadap perilaku seksual mereka. Kondisi fisik maupun psikologis yang amat berat dari hasil berbagai siksaan dan pelecehan martabat menyebabkan kasus bunuh diri mencuat. Berdasarkan data bahwa sampai pada tahun 1978 terdapat sebanyak 310 kasus kematian dengan rincian sebanyak 191 orang tewas akibat sakit, 35 orang tewas akibat kecelakaan (hanyut di sungai, tersambar petir, diserang babi hutan, dll), 15 orang bunuh diri, 53 orang dibunuh petugas dengan berbagai alasan dan sisanya hilang entah kemana.¹⁰

Pada tahun 1977 hingga 1979 adalah saat pemulangan tahanan politik. Namun, kebebasan yang diterima tapol tidak mengandung makna yang sesungguhnya jika ditinjau dari realitas yang para tapol jalani ketika mereka dipulangkan dari penahanan. Mereka masih dihantui penderitaan kendati telah bebas dari Pulau Buru. Salah satu persoalan utama yang menimpa para mantan tapol adalah penerimaan keluarga dan masyarakat. Ketika mereka harus menghidupi keluarganya mereka menemui berbagai kendala. Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan diskriminasi terhadap mantan tahanan politik beserta keluarganya yang salah satu caranya adalah dibuat aturan hukum yang diskriminatif, seperti Keppres No 28 tahun 1975 tentang perlakuan terhadap yang terlibat PKI golongan B dimana yang termasuk

¹⁰ I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru*. Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 47.

golongan ini adalah mereka yang ditahan di Pulau Buru, membatasi hak politik mantan tahanan politik beserta keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal, para mantan tapol juga mendapat tanda khusus pada KTP sebagai penegas status mereka sebagai mantan tapol.¹¹ Para mantan tapol tidak diperkenankan bekerja di bidang yang dimungkinkan menggiring opini publik, seperti bidang pendidikan, jurnalistik, hukum dan pekerjaan lain yang pemerintah anggap strategis serta berbagai aturan lainnya yang merugikan mantan tapol PKI dan keluarganya.

Pada perkembangannya, aturan-aturan tersebut tidak diberlakukan kembali setelah rezim Orde Baru runtuh. Ini sudah seharusnya dilakukan karena menentang makna dari sila Pancasila dimana esensi penting Pancasila adalah menentang keras adanya diskriminasi dan menjunjung tinggi kesetaraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tertuang dengan sangat jelas dalam silanya. Disisi lain perlakuan diskriminasi yang diberikan pada mantan tapol merupakan hukuman yang sepantasnya mereka terima sebagai buah dari perbuatannya sekaligus peringatan supaya tak ada lagi yang berani menjadi simpatisan PKI. Dari uraian tersebut menunjukkan paradox yang melibatkan Pancasila dengan moralitas public. Hal tersebut cukup membingungkan dan menimbulkan keraguan terkait dimana posisi Pancasila sebenarnya dalam kasus diskriminasi.

Pada dasarnya Pancasila sebagai sumber hukum nasional dimaknai sebagai dasar dan landasan bagi pembentukan segala hukum dan pandangan nasional, sehingga pada implementasinya segala bentuk perundangan harus mengarah pada menjaga integrasi bangsa, membangun demokrasi dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasarkan pada prinsip toleransi kemanusiaan dan keberagamanyang berkeadaban. Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap/prinsip/pandangan hidup) merupakan satu

¹¹ *Ibid*, hlm. 50.

keutuhan yang saling menjiwai, yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk dari bermacam etnik/suku bangsa, agama dan budaya yang berumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.

Kasus kekerasan dan kemanusiaan yang terjadi pada tahanan politik Pulau Buru yang dilakukan atas nama melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Gerakan 30 September, dan juga sebagai upaya pengamanan terhadap pemilu, merupakan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dampak lanjut dari kekerasan yang dirasakan tapol berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan sosial ketika telah dikembalikan ke masyarakat. Dampak psikologis yang muncul pada mantan tapol akibat kekerasan yaitu harga diri rendah (*minder*), emosional, sensitive terhadap segala sesuatu, rasa malu, rasa tertekan dan kecemasan berlebih. Tentu kondisi psikologis yang seperti itu turut mempengaruhi cara berperilaku sehari-hari. Sedangkan masalah diskriminasi yang terbawa sampai kepulauan para tapol juga turut berperan besar dalam mempersulit kehidupan mereka. Pasalnya, mereka yang berlabel ‘eks tapol’ sangat sulit mendapatkan pekerjaan sehingga kebanyakan dari mereka membuka usaha dengan mengandalkan suatu keahlian yang mereka dapat ketika berada di pembuangan Pulau Buru. Tentu hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis kehidupan tahanan politik Pulau Buru dengan memilih judul “Kehidupan Sosial Tahanan Politik Pulau Buru Pada Tahun 1969-1979”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah kehidupan tahanan politik saat berada di Pulau Buru, seperti kekerasan apa yang menimpa mereka, dampak psikologis dan sosial terhadap tahanan politik akibat masalah tersebut, proses pengembalian tahanan politik ke masyarakat, reaksi dan penerimaan keluarga serta masyarakat. Alasan yang mendasari penelitian ini adalah meskipun banyak yang menulis

tentang PKI tetapi jarang sekali terdapat pembahasan mengenai kehidupan tahanan politik saat berada di pembuangan dan pengembalian tahanan politik PKI Pulau Buru ataupun daerah lainnya ke masyarakat. Selain itu, ketersediaan sumber yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini juga menjadi alasan penulis mengangkat topik tersebut. Pemilihan tahun 1969-1979 karena tahun tersebut adalah waktu tahanan politik diberangkatkan ke Pulau Buru dan dikembalikan ke masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini telah dibuat rumusan masalah yang akan dicari jawabannya. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih terfokus pada pemecahan masalah yang akan diteliti maka pembatasan masalah tersebut dirumuskan dalam suatu rumusan masalah, yaitu:

“Bagaimana kehidupan sosial tahanan politik Pulau Buru tahun 1969-1979?”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kehidupan sosial tahanan politik saat berada di Pulau Buru pada tahun 1969-1979?
2. Bagaimana kehidupan sosial tahanan politik Pulau Buru setelah dikembalikan ke masyarakat?
3. Bagaimana dampak kekerasan dan diskriminasi terhadap psikologis dan sosial mantan tahanan politik Pulau Buru?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini dibuat untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang kehidupan sosial tahanan politik Pulau Buru tahun 1969-1979.

2. Untuk mendeskripsikan tentang kehidupan sosial tahanan politik Pulau Buru pasca dikembalikan pada masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan tentang dampak kekerasan dan diskriminasi terhadap psikologi dan sosial mantan tahanan politik Pulau Buru.

1.4 Kegunaan Penelitian

Skripsi ini dibuat dengan harapan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat tentang kehidupan sosial tahanan politik Orde Baru, terutama yang ditahan di Pulau Buru, khususnya seputar peristiwa yang menjadi sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian terkait dinamika kehidupan tahanan politik Orde Baru.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan penulis tentang kehidupan sosial tahanan politik dari Pulau Buru pada tahun 1969-1979

2. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat dan juga menumbuhkan kesadaran tentang bahayanya terlibat dalam PKI melalui bahasan tentang kehidupan tahanan politik dari Pulau Buru pada tahun 1969-1979

1.4.3 Kegunaan Empiris

1. Sebagai sarana pengetahuan untuk masyarakat dalam memahami kehidupan tahanan politik Pulau Buru pada tahun 1969-1979

2. Agar pemerintah dapat memperbaiki sistem pemerintahan sehingga dirasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kebijakan diskriminasi apapun.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teori

1.5.1.1 Teori Konflik

Teori dapat didefinisikan sebagai generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam penyusunan generalisasi tersebut, konsep-konsep adalah unsur yang dipakai oleh teori. Konsep tersebut tercipta dari pemikiran manusia. Oleh sebab itu bersifat abstrak meskipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.¹² Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.¹³ Manusia di manapun berada akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Konflik merupakan fenomena dan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori konflik.

Teori konflik awal yang diwakili oleh Karl Marx memberikan sebuah asumsi sederhana tentang masyarakat. Menurut Marx, konflik disebabkan oleh factor ekonomi khususnya tentang pertentangan antara proletar dengan borjuis terkait upah para buruh. Dalam perspektif klasik, konflik selalu dicirikan dengan tindakan-tindakan destruktif yang menakutkan dan berbahaya. Sedangkan dalam teori konflik kontemporer, konflik bukan hanya tentang permasalahan ekonomi tetapi sudah menjadi sesuatu yang permanen di masyarakat yang

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 16.

¹³ Ari, *Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)*, *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2), hlm. 189.

disebabkan oleh prestise, perebutan kekuasaan, dan juga kekayaan. Hampir selaras dengan pemikiran Karl Marx, menurut Johan Galtung konflik dibagi menjadi tiga jenis yaitu langsung, struktural dan kultural. Tiga jenis konflik tersebut didasari oleh arus kausal, sehingga dapat muncul dari jenis-jenis mana saja tergantung pada situasi dan kondisi.¹⁴

Konflik disini tidak dimaksudkan sebagai radikal apalagi pertumpahan darah. Bagaimanapun juga, Marx adalah seorang humanis. Pada hakikatnya teori konflik melihat adanya perbedaan pendapat dan konflik dalam sistem sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak akan selalu baik-baik saja.

Keterkaitan teori konflik dengan topik yang diangkat penulis adalah teori konflik itu sendiri menunjukkan bahwa konflik dalam proses sosial ini diperlukan untuk menghasilkan perubahan sosial baik ke arah negatif maupun positif. Dalam hal ini konflik sosial yang terjadi akibat situasi sosial pasca tragedi 1965 turut mempengaruhi sistem sosial yang berdampak pula pada kehidupan sosial para mantan tahanan politik.

1.5.1.2 Teori Kepribadian

Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Kepribadian merupakan unsur-unsur pokok pembentukan tingkah laku seseorang. Kepribadian antara satu individu dengan individu lainnya berbeda-beda dan setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Adapun teori yang banyak berkembang di masyarakat adalah teori kepribadian Neo Freud.

Teori Neo Freud merupakan gabungan dari ilmu sosial (lingkungan) dan psikologi. Teori ini menekankan bahwa setiap individu berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan orang lain dan orang lain membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Teori ini

¹⁴ *Ibid*, hlm. 190-191.

menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari hubungan sosial.¹⁵ Ada dua hal yang membedakan teori ini dengan teori Freud, yaitu : 1) Lingkungan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia bukan insting manusia. 2) Motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adapun karakteristik kepribadian manusia berdasarkan teori Neo Freud antara lain:

1. *Compliant*

Compliant adalah tipe kepribadian manusia yang ditandai dengan adanya sifat ketergantungan individu satu dengan yang lain. Manusia merupakan *zoon politicon* yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan bantuan orang lain. Seseorang yang memiliki tipe kepribadian compliant akan senang dengan kehangatan dan kebersamaan.

2. *Aggressive*

Berbanding terbalik dengan tipe kepribadian compliant, tipe kepribadian *aggressive* adalah tipe kepribadian manusia yang ditandai dengan adanya motif yang kuat dalam diri individu untuk mendominasi individu lain. Seseorang yang memiliki tipe kepribadian *aggressive* berupaya untuk memenuhi segala ambisinya dengan cara menonjolkan dirinya.

3. *Deteached*

Deteached adalah tipe kepribadian yang dimiliki manusia yang ditandai dengan adanya keinginan untuk merasakan kebebasan. Tipe kepribadian *deteached* biasanya cenderung menyukai keheningan dan percaya diri terhadap kemampuan yang mereka dimiliki.

Pada pokoknya teori Neo Freud menyatakan bahwa dalam membentuk kepribadian seseorang, maka diperlukan adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara individu

¹⁵ Faizin, Penguatan Kompetensi Kepribadian Tenaga Pendidik Pai Melalui Pendidikan Qur'ani Dan Relevansinya Dengan Teori Kepribadian Neo Freud (Sosial Dan Psikologi), TARBAWI Jurnal Pendidikan Agama Islam 8(1), hlm. 27.

dengan masyarakat (lingkungan sosial) untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Keterkaitan teori kepribadian dengan topik yang diangkat penulis adalah bagaimana karakteristik kepribadian yang terdapat dalam teori kepribadian Neo Freud menunjukkan perilaku para tapol ketika sudah dikembalikan pada masyarakat.

1.5.2 Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari berbagai sumber literatur yang telah dibuat oleh penulis terdahulu sebagai bahan perbandingan. Adapun hasil tulisan yang dijadikan bahan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu kehidupan sosial tahanan politik dari Pulau Buru. Berikut beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

I. G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada masa pembersihan PKI oleh rezim Orde Baru, seseorang yang dianggap memiliki keterlibatan dengan PKI akan ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. Krisnadi mengungkapkan bahwa tidak semua orang yang ditapolkan memang bersalah secara hukum. Dijelaskan pula dalam buku tersebut bahwa rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto mentapolkan orang-orang hanya karena perbedaan pikiran dan gagasan. Pemerintah pada saat itu mengirim banyak orang pada kehidupan bak neraka. Mereka yang ditapolkan dan dibuang ke Pulau Buru mengalami penghukuman diluar batas wajar karena telah sampai penyiksaan yang menyebabkan kematian. Kehidupan yang tidak bisa dikatakan baik harus dijalani oleh mereka bukan hanya ketika berada di pembuangan saja, teteapi juga setelahnya yaitu ketika mereka dikembalikan pada masyarakat. Sebelum dibebaskan secara resmi, diadakan upacara dimana para tapol harus membaca sumpah mengenai keharusan bersedia datang apabila dipanggil untuk memberi keterangan, menjadi saksi di pengadilan, kesediaan mengabdikan pada Tanah Air dan seluruh rakyat, dan larangan menyebarkan ideology komunis. Selain itu, para tapol harus menulis surat pernyataan yang berisi tentang tidak adanya

penganiayaan dan kerja paksa selama di Pulau Buru. Kemudian para tapol wajib menandatangani.

Disamping banyaknya tapol yang ingin segera kembali ke kampung halamannya, tidak sedikit pula yang justru tidak mau kembali dengan alasan yang beragam padahal mereka sudah resmi dibebaskan. Ada yang ingin menetap di Pulau Buru karena tidak memiliki apapun di Pulau Jawa, baik harta benda atau keluarga, ada yang ingin menetap karena istrinya sudah menikah lagi, dan ada yang tergiur dengan janji pemerintah yang akan memberikan modal berupa rumah dan lahan pertanian jika menetap di Pulau Buru. Terlebih lagi akan sulit mencari pekerjaan dengan statusnya sebagai mantan tapol. Beberapa alasan itu mendasari para tapol untuk mantap memulai hidup baru di Pulau Buru.

Noersmono, *Bertahan Hidup Di Pulau Buru*. Dalam buku tersebut dijelaskan kondisi para tahanan politik ketika berada di Pulau Buru. Para tahanan politik dihadapkan pada kekerasan dan ketidakpastian. Hal ini telah menekan secara batin yang berakibat fatal terhadap kondisi mental. Mereka juga memiliki perasaan gamang antara menghadapi kekerasan dan ketidakpastian itu atau menyerah. Sembari berlangsungnya perasaan tersebut, tanpa sadar para tapol telah berhasil menghidupkan Pulau Buru. Berbagai kerja wajib yang dilakukan oleh mereka telah memperbaiki sirkulasi ekonomi dan sosial budaya di daerah Pulau Buru (Maluku). Buku tersebut juga menjelaskan selain dituntut hidup mandiri, para tapol harus menanggung biaya pelaksanaan proyek, seperti lauk pauk untuk penguasa Tefaaf Pulau Buru, biaya sarana produksi padi, biaya untuk melayani para pejabat Maluku sampai pembesar sipil dan militer. Para tapol juga diharuskan membuka hutan dan padang savanna menjadi lahan produktif. Selain itu, kerja wajib lainnya adalah membangun saluran air minum, irigasi, jembatan, memperlebar jalan setapak, membangun gedung kesenian, gudang, gubuk sawah, rumah ibadah, lading, dan lain-lain.

Sri Moeljono, *Pembuangan Pulau Buru*. Buku tersebut menjelaskan alasan para tahanan politik dibuang ke Pulau Buru adalah memusnahkan orang-orang komunis sampai ke akarnya dan agar supaya tidak mempengaruhi orang-orang sekitarnya yang telah pancasialis. Awalnya mereka adalah para tahanan politik yang ditahan di penjara Nusakambangan, namun dipindahkan ke Pulau Buru dengan alasan inrehab tersebut lebih aman. Dalam artian para tahanan politik tidak mungkin melarikan diri dengan kondisi daerah tersebut yang hanya dikelilingi oleh hutan belantara, sehingga akan menyulitkan proses melarikan diri para tahanan. Dijelaskan pula mengenai suasana perbudakan di Pulau Buru yang terasa seperti kerja paksa zaman kolonial. Para tapol memiliki rutinitas tiap harinya yaitu kerja wajib. Mereka diharuskan berada diluar barak selama 10 jam penuh untuk bekerja diberbagai proyek. Kegiatan diawali dari pukul 04.00 waktu setempat. Pukul 04.30-05.00 waktu setempat adalah apel. Lalu, mereka mengambil peralatan dan bekerja sampai pukul 12.00 siang. Kemudian istirahat untuk makan siang selama 1 jam setelahnya. Setelah waktu istirahat usai, mereka akan bekerja lagi sampai pukul 19.00 dan dilanjutkan dengan mandi, makan, olahraga, mencari pakan ternak, memancing atau berbincang-bincang dengan teman satu barak.

Muhamad Chairul Basrun Umanailo, *Mayarakat Buru Dalam Perspektif Kontemporer (Kajian Kritis Perubahan Sosial di Kabupaten Buru)*. Buku tersebut menjelaskan bagaimana menjalani keseharian di Pulau buru. Terdapat berbagai macam kerja wajib yang harus dilaksanakan oleh para tahanan politik. Kerja wajib yang utama adalah mengubah kawasan tandus menjadi lahan produktif. Para tahanan politik diperintahkan untuk mencetak sawah, membuka ladang dan huma serta menggarapnya. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh para tahanan politik dengan baik, menghasilkan, dan tentunya menguntungkan. Petak-petak sawah yang digarap oleh mereka telah menghasilkan produksi padi yang melimpah sehingga Pulau

Buru menjadi salah satu kawasan penghasil padi terbesar di Maluku. Kondisi ini turut menguntungkan bagi penduduk asli kecamatan Namlea sehingga dapat dikatakan sirkulasi ekonomi mereka berubah kearah yang lebih baik.

Hersri Setiawan, *Memoar Pulau buru*. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan terkait kategorisasi tahanan politik Pulau Buru dimulai dari adanya tuduhan keterlibatan orang-orang dalam peristiwa G30S. Mereka yang dianggap sebagai simpatisan PKI akan dikategorikan golongan A (yang cukup bukti untuk diadili), golongan B (tidak cukup bukti untuk diadili), dan golongan C (yang terpengaruh oleh ideologi kiri). Orang-orang yang masuk dalam golongan B akan dibuang ke Pulau Buru dimulai dari 1969. Kehidupan para tahanan politik saat berada di Pulau Buru begitu menderita oleh berbagai kerja wajib yang harus dilaksanakan. Dalam kerja wajib membangun jembatan, membuat jalan baru, memperlebar jalan setapak, para tapol dilarang menggunakan peta dan kompas karena dianggap akan dijadikan alat bantu untuk mencari tahu detail geografi Pulau Buru yang bisa memudahkan tapol melarikan diri. Pada bulan Desember 1977 adalah pembebasan pertama rombongan para tapol, tetapi bukan dari Pula Buru. Pada bulan November 1979 adalah pembebasan terakhir.

Para tapol yang dibebaskan akan diangkut menggunakan kapal laut untuk dikirim ke Pulau Jawa. Pembebasan dan pengangkutan itu ada tiga gelombang. Gelombang pertama pada tahun 1977 dan para tapol akan diturunkan di Surabaya lebih tepatnya di pelabuhan Tanjung Perak. Gelombang kedua pada tahun 1978 dan akan diturunkan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan yang terakhir pada tahun 1979 diturunkan ditempat yang sama dengan gelombang pertama, yaitu di Tanjung Perak. Selanjutnya mereka dikirim ke tahanan semula di Jawa yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat Setiawan, para tapol itu hanya dikembalikan pada masyarakat bukan dibebaskan karena adanya keharusan penandatanganan surat pernyataan tentang kesediaan pihak penerima tapol seperti keluarga dan Rukun Tetangga (RT) untuk menerima dan menjamin kelakuan baik Eks tahanan politik.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Tema yang berkaitan dengan persoalan PKI bisa dibilang cukup menarik minat akademisi. Indonesia maupun asing, namun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh mereka kebanyakan lebih memfokuskan kajian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaku gerakan PKI, terlibatnya lembaga kemiliteran atau tidak dalam gerakan tersebut, dan apakah ada campur tangan pihak luar dalam gerakan tersebut. Meskipun banyak yang menulis tentang PKI, tetapi hanya beberapa yang pembahasannya mengenai pembuangan para tahanan politik ke Pulau Buru atau daerah lainnya, bagaimana kehidupan tapol pada saat berada di pembuangan, proses pengembalian tahanan politik PKI Pulau Buru ataupun daerah lainnya ke masyarakat serta apa yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulangan para tahanan politik.

Keadaan dengan keterbatasan kajian yang ada, sedikitnya terdapat tiga karya penting yang membahas mengenai kehidupan para tapol Orde Baru di Pulau Buru. Artikel jurnal yang pertama berjudul *Tahanan Politik Pulau Buru Maluku (1969-1979)* yang ditulis oleh Tati Haryati. Artikel jurnal tersebut berisi tentang kisah kehidupan tahanan politik saat berada di Pulau buru pada rentang waktu dari tahun 1969-1979.

Artikel jurnal yang kedua adalah karya Andrean Eka Setiawan. Sama halnya dengan artikel jurnal karya Tati Haryati, artikel jurnal yang berjudul *Dinamika Kehidupan Tahanan Politik Pulau Buru (1965-1970)* ini bercerita tentang kehidupan tahanan politik di Pulau Buru, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terletak pada pemilihan tahun.

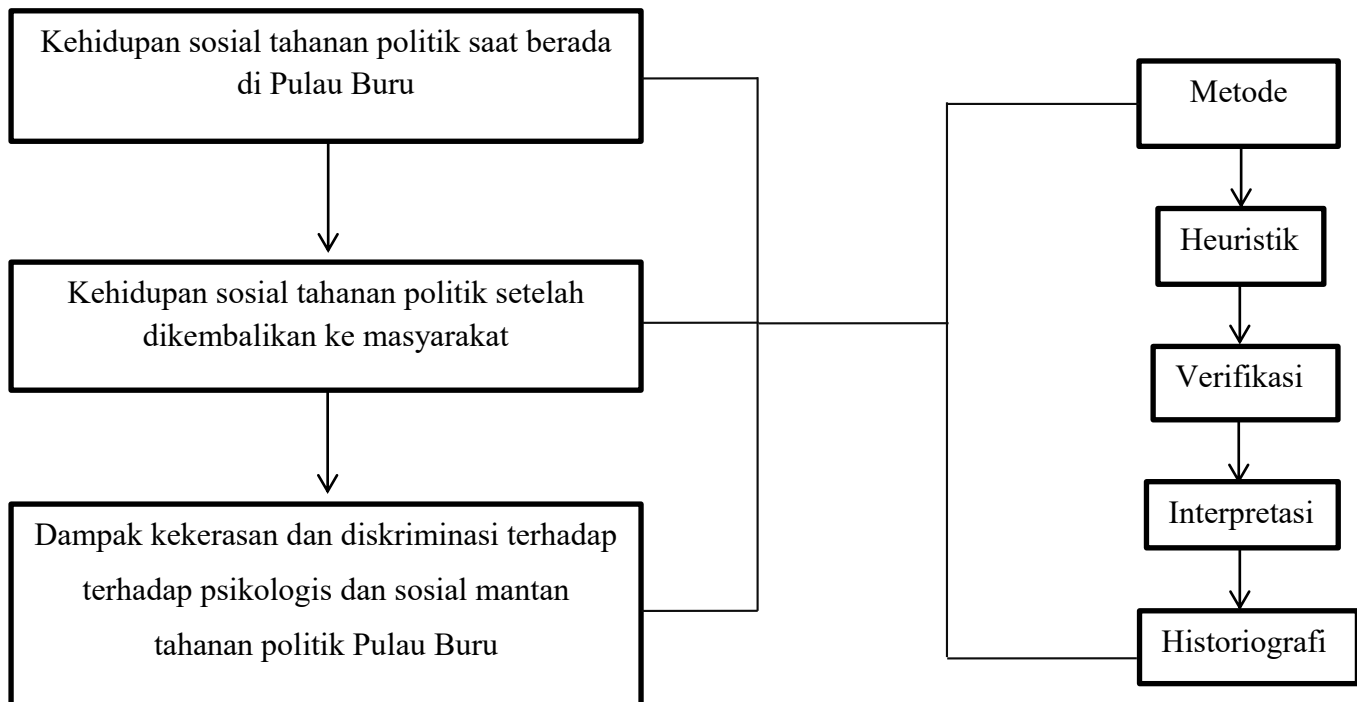
Karya ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul “Menjemput Kerinduan Keluarga” *Penyelesaian Dan Pengembalian Tahanan Politik Pulau Buru Ke Masyarakat, 1965-1979* ditulis oleh Sarkawi B. Husain. Sama halnya dengan artikel jurnal karya Tati Haryati dan, Andrean Eka Setiawan, artikel jurnal ini bercerita tentang kehidupan tahanan politik di Pulau Buru. Disamping informasi yang cukup lengkap, yang menarik dari jurnal ini adalah terdapat pula beberapa lampiran yang dibutuhkan dan berguna bagi penulis, seperti tabel daftar nama-nama Inrehab Pulau Buru, daftar daerah asal dan kondisi para tapol pemulangan tahap 1, foto suasana pertemuan tapol dengan keluarganya, dan KTP berkode ET (eks tapol).

Artikel jurnal *Tahanan Politik Pulau Buru Maluku (1969-1979)* yang ditulis oleh Tati Haryati, *Dinamika Kehidupan Tahanan Politik Pulau Buru (1965-1970)* karya Andrean Eka Setiawan, dan jurnal “Menjemput Kerinduan Keluarga” *Penyelesaian Dan Pengembalian Tahanan Politik Pulau Buru Ke Masyarakat, 1965-1979* karya Sarkawi B. Husain memiliki sejumlah perbedaan dan kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Ketiga karya tersebut berisi tentang kehidupan saat berada di Pulau Buru dan saat setelah bebas, sementara dalam penelitian ini tidak hanya membahas dua hal tersebut tetapi dibahas pula apa yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulangan tapol, proses pemulangan secara lebih rinci dan spesifik, dampak terhadap sisi sosial dan psikologi tapol serta pandangan lima sila Pancasila terkait masalah seputar tahanan politik. Untuk kesamaannya terletak pada obyek kajiannya yaitu dinamika kehidupan tahanan politik Pulau Buru.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Konsep merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya konsep, penulis dapat membatasi dan mengarahkan pada topik yang sedang diteliti. Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran secara umum sehingga akan membentuk

kerangka berpikir yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan teori dalam penelitian. Penelitian ini memaparkan Kehidupan Sosial Tahanan Politik dari Pulau Buru Pada Tahun 1969-1979.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial tahanan politik Pulau Buru. Factor penyebab penahanan tersebut adalah adanya anggapan keterlibatan dalam PKI yang didasari oleh politik. Diharapkan peneliti dapat menemukan gambaran kehidupan tapol pada saat Orde Baru naik takhta dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pada proses penelitian tahap akhir, peneliti akan mencari data mengenai kehidupan subjek (tapol) saat berada di pembuangan dan setelah mereka mendapat kebebasan. Selain itu menganalisa data yang terkumpul dan disesuaikan dengan teori-teori yang berhubungan dengan kehidupan subjek seperti dikaitkan dengan teori kepribadian yang dalam hal ini

berhubungan dengan perubahan karakter atau tingkah laku dan setelahnya semua data yang terkumpul akan diolah dengan metode penelitian sejarah.

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Dalam bukunya, Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa penelitian sejarah terdapat lima tahap yang harus dilalui, diantaranya adalah pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan).¹⁶

1.6.1 Pemilihan Topik

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Pada dasarnya kita bingung dalam pemilihan topik bukan karena terbatasnya pilihan, tetapi karena terlalu banyak masalah yang merupakan hal baru dan belum pernah ditulis sebelumnya. Kesulitan yang biasanya dijumpai karena yang diteliti dan ditulis adalah sejarah artinya harus memilih topik yang dapat diteliti sejarahnya. Harus dipastikan bahwa topik yang dipilih layak untuk dijadikan bahan kajian dan sebisa mungkin bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pemilihan topik sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

Dalam hal ini kedekatan emosional yang mendasari penulis dalam menentukan topik penelitian berawal dari ketertarikan penulis terhadap cerita tentang masa Orde Baru yang disampaikan oleh orang yang bersangkutan. Karena secara kebetulan, penulis memiliki tetanga yang dahulunya pernah menjadi salah satu tahanan politik yang diasingkan di Pulau Buru.

Selanjutnya penulis mencari *literature* yang berkaitan dengan tema penelitian yang kemudian mendasari penulis semakin mantap untuk mengangkat topik tersebut berdasarkan

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Mizan Group, 2005, hlm. 90.

kedekatan intelektual. Topik yang telah ditentukan kemudian dijabarkan dalam sebuah judul yaitu “Kehidupan Sosial Tahanan Politik Pulau Buru Pada Tahun 1969-1979”. Sementara itu, lingkup temporal dalam penelitian ini mulai dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1979 dan ruang lingkup spasial didasarkan pada kehidupan tapol dan termasuk sejarah lokal karena hanya fokus pada satu wilayah, yaitu Pulau Buru, namun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup sejarah secara umum.

1.6.2 Heuristik

Langkah kedua yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik atau bisa disebut pengumpulan sumber. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber atau fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal yang menjadi tanda dalam tahap ini adalah dilakukannya proses pencarian, penelurusan, dan pengumpulan sumber yang relevan dengan topik atau tema yang akan dibahas. Sumber sejarah atau data sejarah diklasifikasikan kedalam sumber lisan dan sumber tertulis.

Sumber sejarah disebut juga data sejarah yang dalam pengumpulannya harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah atau data sejarah dibagi ke dalam dua jenis, primer dan sekunder.¹⁷ Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh pelaku sejarah itu sendiri dan saksi mata atau bisa berbentuk dokumen tertulis yang sejaman dengan peristiwa sejarah. Sementara itu, sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh si pelaku sejarah atau saksi mata, biasanya berbentuk buku.

Dalam hal ini proses heuristik atau pengumpulan sumber sejarah yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mencari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dapat penulis peroleh adalah seseorang yang memiliki ayah dan kakek seorang mantan tahanan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 97.

politik Pulau Buru dan penulis juga memperoleh buku-buku yang ditulis oleh mantan tahanan politik Pulau Buru. Penulis juga mencari sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang menjadi kajian dalam penelitian. Dalam memperoleh sejumlah informasi yang dibutuhkan, penulis memperoleh sumber sekunder untuk mempertajam analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber sekunder yang penulis peroleh antara lain:

1. Gelas-Gelas Retak Trilogi Catatan Aktivis PNI & Tragedi 1965 yang ditulis oleh Atmoko pada tahun 2014
2. Masyarakat Buru Dalam Perspektif Kontemporer (Kajian Kritis Perubahan Sosial di Kabupaten Buru yang ditulis oleh Chairul Basrun Umanallo pada tahun 2015
3. Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979) yang ditulis oleh Krisnadi pada tahun 2001
4. Tilly ‘‘Collective Action Revolusi’’ Kisah Tawanan Boven Digul yang ditulis oleh Leirissa, R. Z. pada tahun 2004
5. Tanah Merah Yang Merah ditulis oleh Soebagyo Toer pada tahun 2010

Setelah memperoleh sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian penelitian, kemudian penulis melakukan penelaahan dan pengklasifikasian terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa penulis benar-benar sudah menemukan sumber yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

1.6.3 Verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah verifikasi atau disebut juga kritik sumber. Verifikasi atau kritik sumber merupakan kegiatan analitik dalam rangka meneliti, menyeleksi sumber atau fakta secara kritis. Dalam prosesnya, kritik dibagi menjadi dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Hal ini didasarkan pada aspek yang terkandung dalam sumber itu sendiri yaitu aspek ekstern dan intern. Fungsi melakukan kritik

sumber berkaitan erat dengan tujuan seorang sejarawan dalam mencari kebenaran. Pada dasarnya seorang sejarawan pasti akan dihadapkan dengan suatu kebutuhan untuk menguji suatu sumber benar atau tidak, dapat dipercaya atau tidak.¹⁸

Kritik eksternal merupakan kegiatan penyeleksian data yang didapatkan dengan menyelidiki asal-usul sumber. Kritik eksternal berfungsi untuk menguji auntsitas, orisinalitas dan integritas suatu sumber. Beberapa pertanyaan yang perlu diungkap antara lain seperti apakah sumber yang didapatkan relevan dengan topik kajian, apakah sumber yang didapatkan asli atau turunan, dan apakah sumber yang didapat kondisinya masih utuh atau sudah berubah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan melakukan kritik eksternal pada suatu sumber. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi sumber adalah kriteria fisik (jenis kertas, tinta, cat), garis asal usul sumber (dokumen), tulisan tangan, dan isi dari sumber.¹⁹

Sementara itu, kritik internal merupakan kegiatan penyeleksian data yang didapatkan dengan menyelidiki kredibilitas sumber tersebut, biasanya lebih ditekankan pada isi dari suatu sumber sejarah. Kritik internal berfungsi untuk menguji sifat sumber, latar belakang penulis (apabila sumber berbentuk tulisan), dan menemukan hasil perbandingan antara sumber yang didapat dengan sumber lainnya. Sama halnya dengan kritik eksternal, ada beberapa pertanyaan yang perlu diungkap dalam proses kritik internal, antara lain seperti apakah sumber yang didapat resmi atau tidak, apa penulis terlibat atau berperan dalam peristiwa yang diteliti (apabila sumber berbentuk tulisan), apakah sumber tersebut memiliki fakta yang sejajar dan objektif apabila dibandingkan dengan sumber lain.²⁰

¹⁸Sjamsuddin, H, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007, hlm, 131.

¹⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 101.

²⁰ Sjamsuddin, H, *op.cit.*, hlm. 134.

Pada tahap ini, penulis memastikan bahwa orang yang nantinya dijadikan narasumber benar-benar dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Oleh karena sumber lain yang didapatkan berupa sumber-sumber *literature*, penulis melakukan kritik terhadap sumber tertulis. Segala informasi baik itu data atau fakta yang diperoleh dari sumber tertulis dipilah-pilah sesuai dengan apa yang diteliti. Penulis cukup yakin dengan keaslian buku yang dijadikan sumber dalam penelitian ini. Penulis sudah melakukan pengecekan terhadap nama penulis/pengarang, tahun terbit, penerbit, tempat buku tersebut diterbitkan dan isinya pun relevan dengan topik kajian serta sumber-sumber *literature* yang diperoleh merupakan sumber sejati yang dibutuhkan.

1.6.4 Interpretasi

Setelah melalui tahap heuristik dan melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang diperoleh, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah interpretasi atau bisa juga disebut penafsiran sumber. Pada tahap interpretasi, penulis menyusun, mengolah, menulis dan menafsirkan fakta-fakta yang terkandung dalam sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Interpretasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Pada dasarnya interpretasi dan penulisan merupakan kegiatan yang menyatu dan dilakukan bersamaan. Fakta yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih dan dihubungkan agar bisa menjadi rekonstruksi yang menggambarkan kehidupan tahanan politik saat berada di Pulau Buru dalam kurun waktu tahun 1969 sampai dengan 1979. Selanjutnya dalam tahap interpretasi ini penulis menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu suatu bentuk pendekatan dalam penelitian sejarah yang dalam prosesnya menggunakan bantuan disiplin ilmu lain dalam hal ini adalah ilmu sosial guna mempertajam analisis terhadap masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini, ilmu sosial lain yang digunakan sebagai ilmu bantu adalah sosiologi dan psikologi.

Selain hal yang telah disebutkan di atas, penulis juga melakukan penafsiran terhadap fakta tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yang menetapkan pembebasan tahanan politik secara formal dan merupakan keputusan yang telah dipikirkan secara matang serta dinyatakan bahwa para mantan tahanan politik tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI seperti yang tertera dalam Surat Pembebasan/Pelepasan. Akan tetapi, fakta lain menyebutkan bahwa adanya kebijakan pembebasan tahanan politik karena datangnya tekanan dari dunia internasional, khususnya dari Amnesti Internasional dan negara pendonor dana yang mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik sebagai salah satu prasyarat pencairan dana bantuan. Pembebasan tapol juga bukan tanpa syarat, melainkan mereka harus melakukan “wajib lapor” kepada pejabat dan lembaga kemiliteran yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, yang dapat penulis tafsirkan dari hal tersebut bahwa terdapat kontradiksi antara kebijakan pemerintah dengan kenyataan yang terjadi terkait pembebasan tahanan politik.

1.6.5 Historiografi

Setelah melalui serangkaian tahap di atas, tiba saatnya penulis memasuki langkah terakhir dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu historiografi atau laporan penelitian. Pada tahap ini penulis menuangkan seluruh kemampuan intelektualnya dalam penggunaan catatan atau kutipan dan utamanya adalah pikiran kritis dan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Hal ini karena pada dasarnya penulis dituntut untuk melahirkan sintesis yang merupakan hasil dari penelitiannya yang kemudian dijabarkan dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah yang utuh berjudul “Kehidupan Sosial Tahanan Politik Pulau Buru Tahun 1969-1979.”

Penulis membagi penulisan skripsi ini kedalam tiga bagian seperti yang terdapat dalam buku Kuntowijoyo bahwa penyajian penelitian dalam bentuk tulisan pada umumnya

memiliki tiga bagian utama, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Penulis akan mengemukakan mengenai permasalahan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian dalam bagian pengantar. Dalam bagian hasil penelitian akan dijabarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan atau jawaban dari pertanyaan 1) Bagaimana kehidupan sosial tahanan politik saat berada di Pulau Buru? 2) Bagaimana kehidupan sosial tahanan politik setelah dikembalikan pada masyarakat? 3) Bagaimana dampak kekerasan dan diskriminasi terhadap psikologis dan sosial mantan tahanan politik Pulau Buru? Dan bagian terakhir yang akan berisi kesimpulan jawaban terhadap beberapa permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

1.7 Sistematika Pembahasan

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian memiliki batasan penelitian karena di lapangan banyak gejala yang menyangkut pelaku, aktivitas, serta tempat. Oleh sebab itu, untuk menemukan pilihan harus membuat suatu batasan yang dinamakan fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan diselidiki pada penelitian ini adalah bagaimana kehidupan tahanan politik Pulau Buru ketika berada di pembuangan yaitu Pulau Buru dan ketika sudah dikembalikan pada masyarakat, namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kehidupan tahanan politik ini perlu ditelusuri yang melatarbelakanginya dengan terlebih dahulu mendeskripsikan kronologis penyebab orang-orang tersebut dijadikan sebagai tahanan politik di Pulau Buru.

1.7.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti atau hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa materi yang dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Objek yang dijadikan target dalam penelitian ini adalah kehidupan tahanan politik Pulau Buru ketika

berada di pembuangan dan ketika telah dikembalikan ke masyarakat dalam kurun waktu tahun 1969-1979. Sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana data-data penelitian diambil. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Data tertulis diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan data lisan diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang diambil penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian atau dapat juga diartikan sebagai langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.7.3.1 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu studi atau kajian mengenai sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, naskah, dan artikel ilmiah atau jurnal yang diterbitkan. Dalam mengawali pencarian, dapat menggunakan buku yang menjadi sumber referensi. Pada tahap ini, penulis membeli beberapa buku yang relevan, mengunjungi perpustakaan Universitas Siliwangi, Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kota, Sekre HIMAS UNSIL, dan Google Cendekia untuk mencari artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang diperoleh dari studi pustaka disimpan dan dicatat untuk memudahkan penulis mendeskripsikan permasalahan yang diteliti.

1.7.3.2 Wawancara

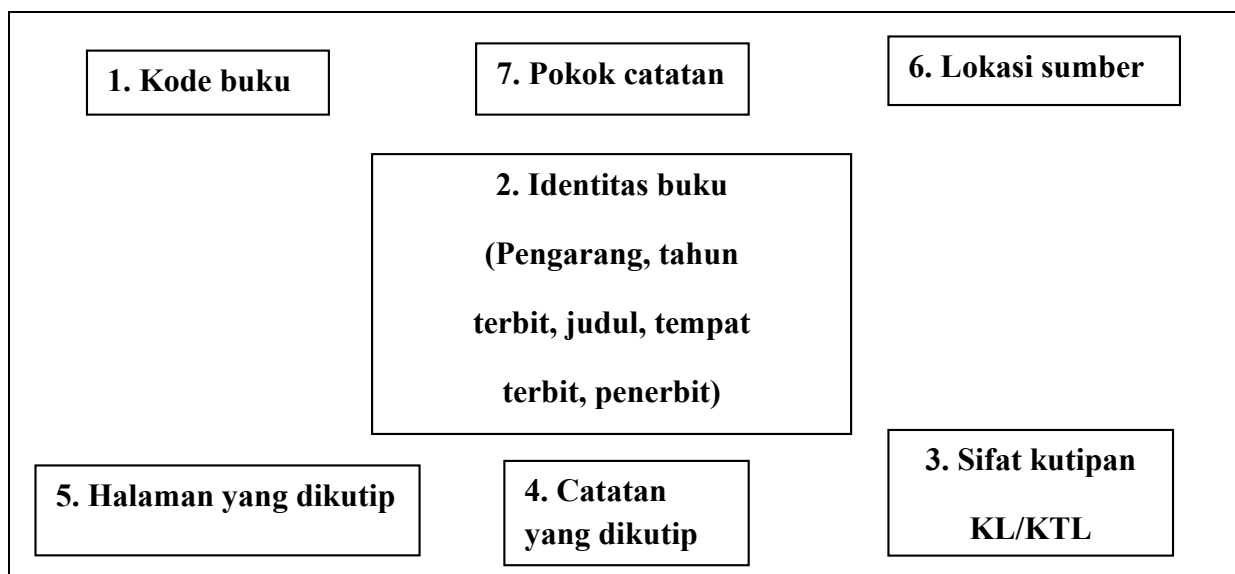
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga jika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam hal-hal dari narasumber. Dalam penelitian ini

dilakukan wawancara kepada anak sekaligus cucu dari salah satu mantan tahanan politik Pulau Buru. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang merupakan wawancara bebas dalam artian peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman yang digunakan peneliti hanya berupa garis besar dalam permasalahan yang diangkat.

1.7.4 Instrumen Penelitian

Objek penelitian ini merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sehingga dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa sistem kartu. Alasan penulis menggunakan sistem kartu karena lebih efektif digunakan dalam penelitian. Setiap data yang sudah diperoleh kemudian dicatat lembaran kartu satu persatu dengan mencantumkan identitas buku atau sumber. Pada pokoknya kartu yang biasa dipakai untuk catatan atau kutipan, satu kartu memuat satu catatan. Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian sejarah menurut Iyus Jayusman dalam Hidayati adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Sistem Kartu



Sumber : Iyus Jayusman (2008:13)

Keterangan:

- a. Kode buku untuk menyusun daftar pustaka secara berurutan sesuai dengan abjad.
- b. Identitas buku (Pengarang, tahun penerbit, judul, tempat terbit, penerbit) adalah nama penulis beserta identitas buku yang ada didalam buku.
- c. Catatan yang dikutip, yaitu tempat mencatat yang perlu dikutip, dapat dilakukan dengan cara mengutip secara langsung atau tidak langsung.
- d. Halaman yang dikutip yaitu tempat untuk menulis halaman yang dikutip
- e. Sifat kutipan, berisi sifat kutipan yang digunakan, baik yang bersifat kutipan langsung maupun tidak langsung.
- f. Lokasi sumber berisi tentang lokasi atau tempat dimana sumber diperoleh.
- g. Pokok catatan adalah tempat mencatat pokok catatan atau berisi inti dari sumber yang didapatkan.

1.7.5 Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terencana agar supaya pemecahan masalah atau jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian dapat diperoleh. Langkah-langkah penelitian yang peneliti tempuh adalah sebagai berikut.

1. Memilih Masalah

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah memilih masalah yang akan diteliti. Penulis menentukan masalah yang akan diteliti dengan mempertimbangkan apakah tema yang ingin diteliti memiliki kaitan dengan kajian ilmu sejarah. Penulis juga mempertimbangkan ketersediaan sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan ketertarikan terhadap tema yang akan diteliti. Dalam hal ini

penulis tertarik untuk mengangkat tentang kehidupan tahanan politik Pulau Buru dari tahun 1969-1979. Setelah memutuskan permasalahan yang akan diangkat, penulis memperoleh judul penelitian yang akan diajukan kepada Dosen Pembimbing.

2. Studi Pendahuluan

Penulis melakukan studi pendahuluan untuk mempelajari sumber yang telah diperoleh. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis adalah mengunjungi perpustakaan, membaca beberapa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar kedudukan masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan tidak terlalu luas.

3. Merumuskan Masalah

Setelah melakukan studi pendahuluan maka masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah membuat rumusan masalah dengan mencatat beberapa pertanyaan yang menjadi topik permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah agar penelitian lebih terfokus pada titik tertentu sehingga permasalahan mengerucut.

4. Merumuskan Anggapan Dasar

Anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti sebagai dasar dari pelaksanaan penelitian. Anggapan dasar dirumuskan oleh penulis berdasarkan asumsi-asumsi penulis yang diperoleh dari studi pustaka dan pemahaman penulis mengenai objek yang akan diteliti.

5. Memilih Pendekatan

Pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Alasan pemilihan metode tersebut karena penelitian yang akan dilakukan penulis mengacu pada penelitian kesejarahan. Oleh sebab itu, pendekatan yang dipilih penulis adalah historis agar sesuai dengan prosedur penulisan sejarah yang tersusun secara kronologis.

6. Menentukan Sumber Data

Langkah yang diambil penulis dalam menentukan sumber data adalah melakukan pengumpulan berbagai sumber. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data lainnya yang menunjang penelitian penulis yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber yang bersangkutan.

7. Mengumpulkan Data

Dalam langkah ini penulis melakukan proses pengumpulan data. Data yang telah diperoleh dikumpulkan dari berbagai perpustakaan maupun koleksi pribadi. Data yang diperoleh dan dikumpulkan harus relevan dengan penelitian baik itu berupa buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu dan sumber data lainnya.

8. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, yang dilakukan selanjutnya adalah pemilihan data dan mengklasifikasikan data untuk memecahkan masalah penelitian. Dengan adanya analisis data ini penulis dapat menemukan apa yang penting untuk dipelajari sehingga dapat disampaikan kepada orang lain melalui penelitian ini.

9. Menarik Kesimpulan

Dalam langkah ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang telah diolah akan dicocokkan dengan dugaan yang telah penulis uraikan sebelumnya. Apabila dugaan awal atau kesimpulan awal didukung oleh data-data yang telah diolah, maka dugaan atau asumsi tersebut dapat dianggap kredibel.

10. Menulis Laporan

Langkah terakhir adalah penyusunan laporan dari bahan-bahan yang telah terkumpul melalui serangkaian langkah yang telah dilalui. Peneliti menyusun laporan penelitian dalam

bentuk skripsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Dewan Bimbingan Skripsi (DBS) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

1.7.6 Waktu dan Tempat Penelitian

1.7.6.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2022 dan untuk mengetahui lebih detail dan terperinci jadwal penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan						
		Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023
1.	Memilih masalah							
2.	Studi pendahuluan							
3.	Merumuskan masalah							
4.	Merumuskan anggapan dasar							
5.	Memilih pendekatan							
6.	Menentukan sumber data							
7.	Mengumpulkan data							
8.	Analisis data							
9.	Menarik kesimpulan							
10.	Menulis laporan							
11.	Sidang skripsi							

1.7.6.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan-perpustakaan yang mendukung sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perpustakaan yang penulis kunjungi, yaitu perpustakaan Universitas Siliwangi, Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kota, Sekre HIMAS UNSIL. Penulis juga mengunjungi tempat tinggal dari narasumber.